



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA PANGKALAN INDARUNG KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

EPRIZAL

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Jl. Gatot subroto KM 7 Telp 0760-561655 fax 0760-561655, email : unikskuantan@gmail.com

email: Epririau@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra yang kokoh dari pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Hi harapkan Pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membawa kemajuan dengan memberikan arahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa yang lebih baik, khususnya dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang di gunakan mengacu pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31. Metode penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang yang berasal masyarakat dan BPD. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

This study aims to describe and explain the functions of the village consultatif body in Pangkalan Indarung village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The considerations that underlien this research, that the village consultative body (BPD) is a solid partner of the village government in developing and prospering the people. It is hoped that the village government and the village consultative body (BPD) can bring progres by providing direction and input in building a better village government, especially in the formulation and enactment of village regulation (Perdes). In the Pangkalan Indarung, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The indicators used are based on low number 6 of 2014 article 31. The research method used was qualitative with 5 informants who came from the community body BPD . The results of this study found thad the funcion of the consultative body (BPD) in the Pangkalan Indarung village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency has not created properly.

Keywords : Function, BPD



1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemeritah desa di bentuk badan permusyawaratan desa atau yang sering di singkat dengan BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,peran BPD sangat penting karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat,oleh karena itu sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD di harapkan dapat terwujud suatu proses lembaga dalam menyelenggaraan pemerintahan desa.peran BPD sangat penting karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.oleh karena itu,sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik di mulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa pangkalan indarung
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Pangkalan indarung belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan Desa Pangkalan indarung, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang pertanian dan budidaya perikanan.
3. Kepala DPD beserta Anggotanya kurang memperhatikan kinerjanya dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa. Dimana tidak terperhatikannya kondisi fisik Aula Desa, sehingga kurang layak untuk dijadikan tempat dalam rapat musyawarah Desa. Dan juga kurangnya atribut atau pajangan di kantor BPD seperti Standart Operating Procedure (SOP) dan struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana beberapa hal tersebut dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan KTP serta Kartu Keluarga (KK), dan juga memudahkan para aparatur dalam melayani masyarakatnya.



Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana BPD Desa Pangkalan indarung mengenai pelaksanaan fungsinya. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa pangkalan indarung kecamatan singingi kabupaten kuantan singing*.”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Pangkalan indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pangkalan indarung kecamatan singing kabupaten kuantan singing.

1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Di Desa pangkalan indarung kecamatan singing kabupaten kuantan singingi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu mengasah kemampuan dan memperkaya pengetahuan penulis tentang bagaimana Fungsi BPD terhadap kinerjanya

1.4.4 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi pemerintah desa terkait dalam mengimplementasikan fungsi BPD.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi Negara (Publik Administration) adalah suatu "*species*" dalam lingkup "*genus*" administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang kooperatif. Species lain nya dapat kita kenali seperti administrasi niaga atau perusahaan (*bussiness administration*) dan administrasi privat non perusahaan niaga. Administrasi negara dan administrasi niaga/perusahaan telah dikembangkan sebagai cabang-cabang ilmu yang diajarkan dalam dunia pendidikan tinggi bahkan menjadi suatu fakultas seperti Comell University dikenal dengan nama "*chooll of publik and Bussiness Administration*" dan juga di Indonesia di berbagai Perguruan Tinggi Universitas dikenal adanya Fakultas Ketatanegaraan dan Ketata niagaan ataupun dengan jurusan/program studi Administrasi Negara (juharni, 2015:1).

2.1.2 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu asset yang penting oleh karena itu harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi, beberapa pengertian MSDM diantaranya disampaikan oleh:

Mondy dan Noe mendefinisikan manajemen sumber daya manusia (human race management) sebagai pendayagunaan sumber daya manda untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi Malaya S.P. Hasibuan menyampaikan bahwa MSDM adalah ihm das seni mengatur hubungan din peranan tenaga kerja agar elektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

2.1.3 Teori Organisasi

Merupakan konsep untuk menenpkan ide agar suatu wadah manajerial bisa melaksanakan dan menghasilkan kinerja dalam menunjang. sebuah perusahaan maupun individu mencapai target yang diinginkan, Tanpa statu organisasi scoring CEO maupun manajer akan sulit bahkan jurang mencapai hasil yang diharapkan dalam sebuah penerapan ide. Perkembangan teori organisasi dimulai pada tahun 1919-an dengan lahirnya teori munajemen ilmiah, dan berakhir pada tahun 1960-an dengan lahimya teori modern yang mengakomodasi segi manusia, mesin, teknologi, dan lingkungan sebagai dasar peningkatan produktivitas organisasi.

2.1.4 Teori Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Frasa "kesatuan masyarakat



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

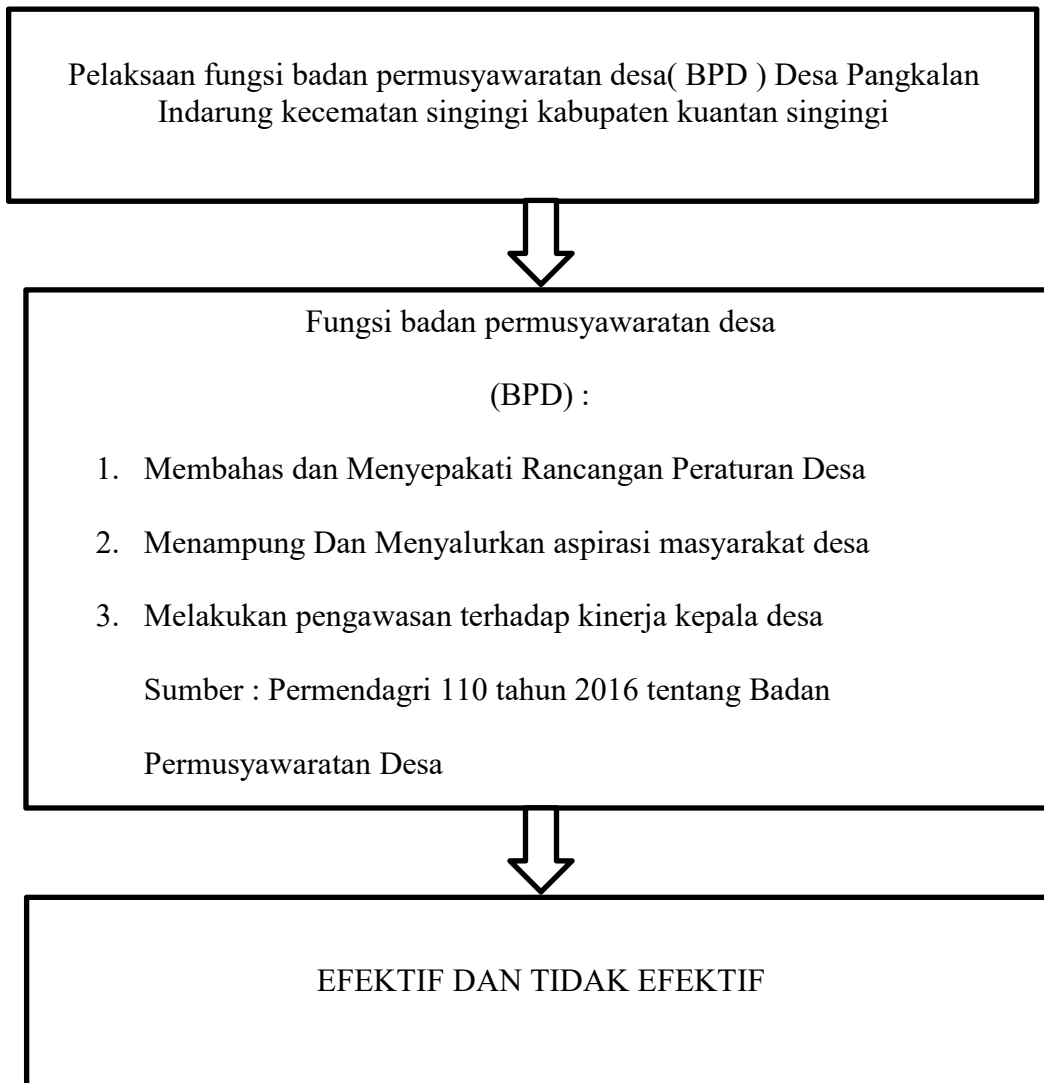
hukum telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government). Artinya: kewenangan Desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan masa lalu maupun berkembang dinamis karena prakarsa masyarakat masyarakat yang berprakarsa membentuk keberadaan Desa dan setempat.(riant Nugroho 2021:20)

2.1.5 Teori Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala Desa mengemukakan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang sadar akan peraturan terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah Desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa bersama perangkat Desa beserta BPD diminta agar menjalankan tugas pemerintahan desa dengan baik. Seperti dalam hal pembahasan dan perumusan kebijakan peraturan desa, terutama pada hasil ekonomi serta pengelolaan aset desa.(Irwandi 2018)

2.2 Kerangka pemikiran

Gambar 2.2 kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2022

3. METODE PENELITIAN

3.1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang di kumpulkan berbentuk kata kata, gambar, bukan angka. artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).



3.2 informan

Informan adalah orang yang di anggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan jawaban/informasi kepada peneliti. Untuk memperoleh data guna kepentingan penulis serta adanya hasil yang resprensetatif, maka diperlukan informan kunci (mengingat penelitian ini adalah studi kasus) yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian pada Desa Pangkalan Indarung

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Anggota BPD	2
3	Masyarakat	2
	JUMLAH	5

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussionFGD) dan penyebaranya kuesioner. (Sandu Siyoto, 2015 : 67).

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. (Sandu Siyoto, 2015 : 68).



Data sekunder yaitu sumber yang tidak memberikan data kepada sumber data, misalnya lewat orang lain atau dokumen lain data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku, dokumen, dan internet

3.4 Fokus Penelitian

Dari paparan diatas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa didesa Pangkalan Indarung

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pangkalan indarung kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi. Dimana di Desa Pangkalan indarung terdapat anggota BPD yang berjumlah 7 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Pangkalan indarung karena di Desa tersebut Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintah Desa, sehingga banyaknya permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan tugasnya sehingga memicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa secara maksimal.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara menurut Esterberg yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. (dalam sugiyono, 2013 : 231).

Wawancara adalah suatu interaksi yang di dalamnya terdapat didalamnya terdapat pertukaran atau sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.cara pengambilan data dilakukan dengan melalui komunikasi langsung dengan informan. Beberapa wawancara di lakukan supaya peneliti mendapatkan data primer yang lebih jelas dan langsung dari sumbernya.

3.6.2 Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Observasi menurut Sutrisno Hadi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (dalam sugiyono, 2013 : 145).



Teknik Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indera manusia dan merupakan langkah yang efektif untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial. Dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang akan diteliti, terhadap objek pengamatan di lokasi yang sama. Observasi di fokuskan pada pengamatan Pelaksanaan Fungsi BPD

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada dokumen atau catatan yang ada pada lokasi penelitian. Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240), yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.

Dokumen biasanya berbentuk dokumen resmi, berkas dan laporan dan juga memanfaatkan sumber daya seperti kamera sebagai sarana untuk menangkap informasi berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan dari beberapa sumber, seperti papan struktural serta foto.

3.7 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pangkalan Indarung. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik. Reduksi data menurut sugiyono (2016:247), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data dalam hal ini peneliti melakukan proses pengumpulan dan penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang di rasa masih kurang.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang dari penyajian tersebut.



Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Penyajian adalah penyajian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat data yang secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan peneliti dengan memaparkan secara umum kemudian secara spesifik.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Indikator Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa

Kesimpulan dari indikator membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah kinerja BPD dalam membahas rancangan tentang Peraturan Desa tidak efektif karena menurut informan BPD bekerja tidak terlalu efektif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD dalam hal ini. BPD juga tidak mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat. Menurut informan belum ada BPD mengajukan apalagi membahas peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja sehingga mereka belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik bagi masyarakat. Menurut peneliti anggota BPD memang belum melaksanakan fungsinya dalam hal ini dengan baik, anggota BPD belum efektif dan kompeten dalam bekerja.

4.2 Indikator Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Kesimpulan dari Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan anggota BPD memang belum cukup aktif dalam Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berinisiatif untuk memberikan solusi atau masukan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, dan juga BPD belum pernah turun ke lapangan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa BPD belum bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.

4.3 Indikator Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa

Untuk kesimpulan Indikator Melakukan Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada



informan maka peneliti mendapat jawaban bahwa harus ada transparansi keadaan jika memang kinerja Kepala Desa kurang baik harus di berikan teguran ataupun sanksi tertulis, masyarakat berharap tidak ada kecurangan dalam Pemerintahan Desa, agar desa bisa maju dan berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak tranparansi terhadap hal tersebut sehingga masyarakat kurang baik pandanganya terhadap BPD.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Anggota Permusyawaratan Desa Didesa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Saran

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa didesa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1 .BPD desa Pangkalan Indarung kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebagai penggagas legislasi peraturan dengan demikian hendaknya anggota BPD melakukan Evaluasi dan mencari Solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD desa Pangkalan Indarung dalam rapat pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD desa Pangkalan Indarung dapat lebih meningkatkan perannya dalam tahap inisiasi
2. Kordinasi pemerintah Desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar peraturan Desa yang ada di Desa Pangkalan Indarung dapat di tingkatkan
3. Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Indarung untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat adar tercipta komunikasi dengan baik.
4. BPD desa Pangkalan Indarung mampu meningkatkan lagi komitmen antara anggota maupun antar Pemerintahan Desa agar terciptanya pelaksanaan tugas yang lebih baik lagi.
5. Agar terciptanya pelaksanaan tugas yang baik, sebaiknya BPD lebih meningkatkan kerja sama yang baik dengan perangkat desa agar terjadi sinkronisasi yang efektif
6. BPD kedepannya harus lebih peduli dan aktif dengan peningkatan ekonomi asli Desa dari sektor Pariwisata, karena keasrian alam desa Pangkalan Indarung masih tetap terjaga.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur yang tidak terhingga kepada ALLAH SWT. Atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dihari kelak.

Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari kata sempurna dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan saran dan masukanya dari segala pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP, M.si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S,Sos, M,Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Sahri Muharam, S,Sos., M,Si, selaku Pembimbing I yang telah banayak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.
5. Emilia Emharis, S,Sos., M,Si, selaku Pembimbing II yang telah banayak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini
6. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan Ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta doanya kepada anaknya yang tercinta.
8. Teman-Teman seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2019 , yang selalu memberikan Support dan semoga kita semua dilancarkan dalam segala urusan dan di beri hidayah serta iman yang kuat untuk menjalani hidup ini, semoga kita wisuda tahun depan bersama-sama tanpa ada yang ketinggalan.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- Aljabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Aljabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara. Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Anggara, s. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. pustaka setia.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang : AE Publishing.
- Fitriana. (2021). Implementasi Prinsip Parsipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 266-283.
- I Rajiani, B. R. (2021). Entrepreneurial Business and Economics Review 9. *Google Cendekia*, 151-162.
- Juharni. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Karinda, K. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggara Pemerintahan. *Jurnal Sosio Sains*, 73 - 86.
- Larasati, S. (2018). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. YOGYAKARTA: CV.BUDI UTAMA.
- M. d. (2021). *Teori Organisasi*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Nugroho, R. (2021). *Kepemimpinan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. PERMENDAGRI.
- Sahupala, B. (2021). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara*. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- S. S. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. purwokerto: CV.IRDH.
- Siswandi , Sululing;. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Purwokerto: CV.IRDH.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wijaya, U. H. (2020). *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Penelitian*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.
- Siswandi , Sululing;. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Purwokerto: CV.IRDH.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Wijaya, U. H. (2020). *ANALISIS DATA KUALITATIF Teori Konsep Penelitian*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.

B.Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa*. PERMENDAGRI.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa